

PERUBAHAN RENJA 2022



**BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka dijelaskan dalam secara garis besar dokumen perencanaan pembangunan daerah, terdiri dari dua bagian besar :

1. Rencana Pembangunan Daerah
2. Rencana Perangkat Daerah

Rencana pembangunan daerah terdiri dari 3 (tiga) dokumen utama perencanaan yaitu : RPJPD, RPJMD, RKPD, sedangkan pada Rencana Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) dokumen utama perencanaan yaitu : Renstra dan Renja.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan satu dari sekian banyak perangkat daerah yang diwajibkan menyusun dokumen perencanaan yaitu renstra dan renja, dimana renja atau rencana kerja itu merupakan penjabaran dokumen tahunan atas rencana strategis yang disusun untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, sehingga dalam renja akan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

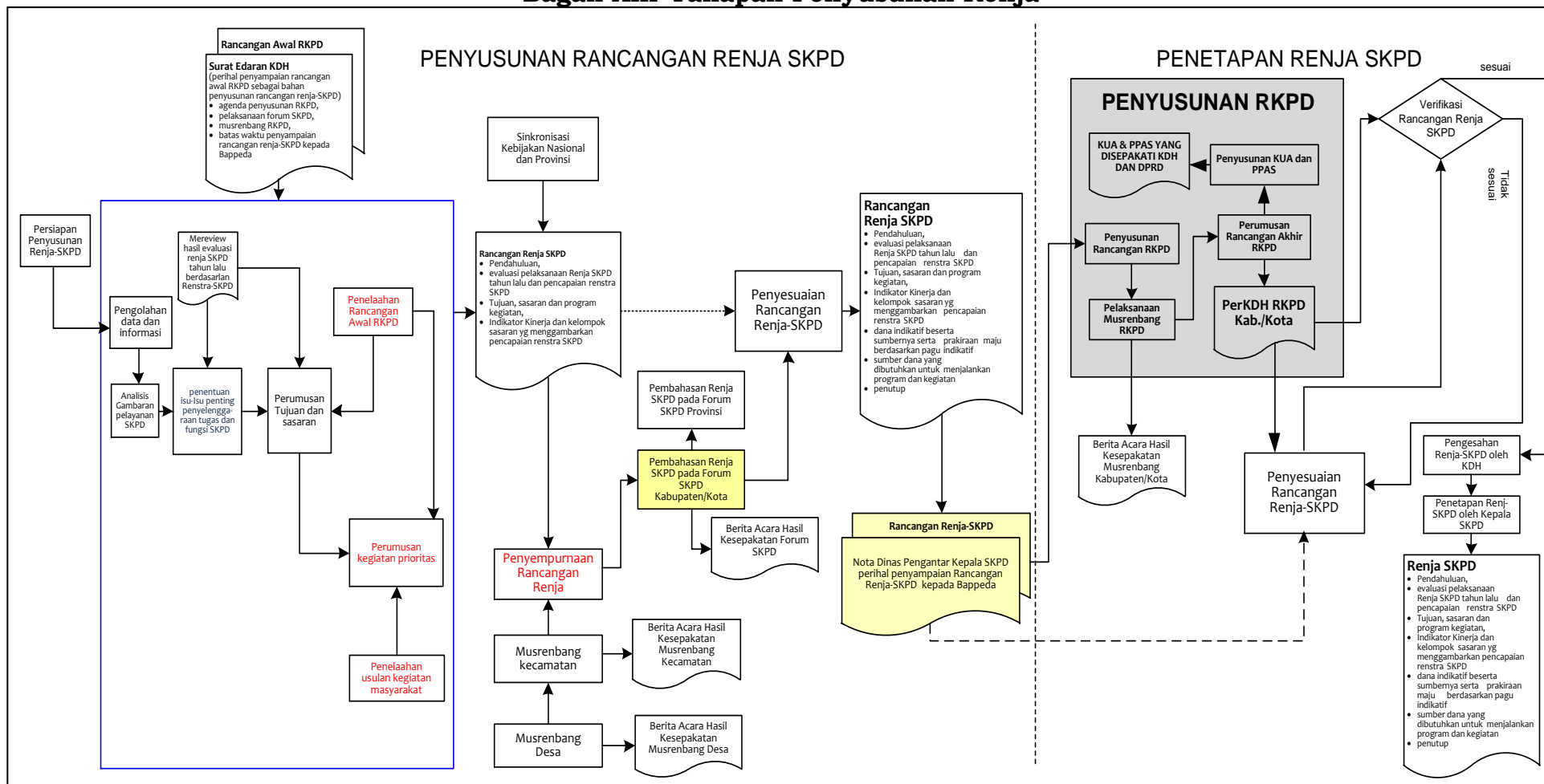
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunantahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misidan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1.
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sejalan dengan Visi Kota Cimahi yakni Menjadi Cimahi Baru, Maju dan Berbudaya serta dalam penjabaran RPJMD Kota Cimahi tertung misi-misi Kota yang didukung oleh seluruh perangkat daerah, dimana salah satunya BPKAD yang bersinergi dengan misi meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis, yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik, maka dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Cimahi dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi 2005-2025; (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi 2017-2022; (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 228 Tahun 2018);
13. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi Tahun 2022.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA - Perubahan PPAS) Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi Tahun 2022, meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
- BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Perencanaan anggaran tahun 2022 merupakan tahun ke lima dari pelaksanaan Visi Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD 2017-2022. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjalankan misi kedua dari lima misi yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien dan Ekonomis yang berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik”.

Rencana Kerja BPKAD mengacu kepada dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penyusunan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan ditetapkan dan dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja baik di level Kepala sampai kepada teknis di level Kasubid dan Kasubag.

Evaluasi Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 semester 1 dapat tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
 Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022 Semester 1
 Kota Cimahi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Semester 1 Tahun 2022
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	Nilai LKIP	100%	100%
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	3 Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	14 Laporan dan 2 Dokumen	7 Laporan dan 1 Dokumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji ASN Selama 1 Tahun	14 Laporan	7 Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan BPKAD	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran BPKAD	1 Dokumen	0 Dokumen

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang	12 Bulan 7 Dokumen dan 1 Kegiatan	6 Bulan 7 Dokumen dan 1 Kegiatan
Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor beserta pemeliharannya	12 Bulan	6 Bulan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Bahan-bahan Logistik Kantor	12 Bulan	6 Bulan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Barang Cetak dan Penggandaan	7 Dokumen	7 Dokumen
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Tersedianya Perjalanan Dinas	12 Bulan	6 Bulan
Penataan Arsip Dinamis	Jumlah Bulan Tersusunnya Arsip Dinamis	12 Bulan	6 Bulan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Sosialisasi Naskah Dinas Elektronik	1 Kegiatan	1 Kegiatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang	1 Paket	1 Paket
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gudang Kantor	1 Paket	0 Paket

Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Jasa Urusan	Tersedianya Jasa Penunjang	12 Bulan 1 Paket	6 Bulan 1 Paket
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Telepon	12 Bulan	6 Bulan
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Paket Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	1 Paket	1 Paket
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	6 Bulan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Bulan Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	6 Bulan

Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu, Laporan Keuangan Sesuai SAP dan Utilitas Aset	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	14 Dokumen	4 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 dokumen	2 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	0 dokumen
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi	1 Laporan	0 Laporan
Koordinasi, Penyusunan dan Perubahan RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Laporan	0 Laporan

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Laporan	0 Laporan
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah DPA Perubahan-SKPD yang Diverifikasi	1 Laporan	0 Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	0 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	0 Dokumen
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	0 Dokumen
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Penyusu Anggaran Perangkat Daerah	1 Laporan	0 Laporan
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Perbendaharaan Yang Disusun Tepat Waktu	382 Laporan	204 Laporan

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	48 Laporan	18 Laporan
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	224 Laporan	120 Laporan
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi	5 Laporan	5 Laporan

	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	6 Laporan

Rekonsiliasi Penerimaan Pengeluaran Kas Pemungutan Pemotongan Atas dengan Instansi terkait	Data dan serta dan SP2D	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	105 Laporan	55 Laporan
Penyusunan Teknis Keuangan yang dengan penerimaan pengeluaran kas penatausahaan pertanggungjawaban kegiatan	Petunjuk Administrasi yang berkaitan dan serta dan sub	Tersusunya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen

Pembinaan Penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/ Kota	Terbinanya bendahara penerimaan dan pengeluasarn SKPD	1 Laporan	0 Laporan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan sesuai SAP	28 Dokumen 4 Laporan 2 Kegiatan	10 Dokumen dan 2 Laporan
Rekonsiliasi dan verifikasi Aset Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan beban	Jumlah Dokumen Laporan Bulanan, triwulan dan Semesteran	4 Dokumen	2 Dokumen
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Analytical Review	2 Laporan	1 Laporan

<p>Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan PBD Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</p>	<p>2 Dokumen</p>	<p>0 Dokumen</p>
<p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan</p>	<p>1 Dokumen dan 1 Laporan</p>	<p>0 Dokumen dan 1 Laporan</p>

Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		
Penyusunan Kebijakan dan Penduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen
Penyusunan sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penyusunan Laporan Keuangan	1 Dokumen	0 Dokumen
Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan	Jumlah Sosialisasi AKuntansi	1 Kegiatan	0 Kegiatan

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Kegiatan	1 Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Dearah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan	3 Laporan	3 Laporan

	Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2 Laporan	1 Laporan
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan

Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Utilitas Aset	100%	100%

Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	28 Dokumen	26 Dokmen
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	3 Dokumen	0 Dokumen

Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen hasil pengamanan barang milik daerah	6 Dokumen	6 Dokumen
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Dokumen	0 Dokumen
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Kegiatan	0 Kegiatan
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan,	5 Dokumen	1 Dokumen

Penghapusan Barang Milik Daerah	pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah		
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pembinaan Perangkat Daerah	4 Kegiatan	0 Kegiatan

2.2 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis

1. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
 - a. Pelaksanaan Aplikasi SIPD Penatausahaan, Pelaporan dan Pencatatan Aset
 - b. Mekanisme Pergeseran Anggaran
 - c. Sertifikasi Aset Pemerintah Kota
 - d. Peran Kustodian di Perangkat Daerah dalam Penatausahaan BMD
 - e. Pemanfaatan Aset
2. Rekomendasi dan Catatan Stragetis
 - a. Percepatan Implementasi SIPD Penatausahaan dan Pelaporan serta Integrasi Pencatatan Aset.
 - b. Penyusunan Perkada berkaitan dengan Pergeseran Anggaran
 - c. Penelusuran dan Percepatan Sertifikasi Aset Milik Pemerintah Kota Cimahi
 - d. Optimalisasi Pengurus Barang/ Kustodian di Perangkat Daerah
 - e. Koordinasi dengan SKPD Terkait Tarif dari Pemanfaatan Aset

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai BPKAD merupakan penjabaran yang nyata dari perumusan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik yaitu :

Teroptimalisasinya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan asset daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut adalah optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah, yang dapat terukur melalui tingkat keberhasilan mencapai :

1. Penetapan APBD secara tepat waktu;
2. Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Rasio Utilisasi Aset.

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang diampu BPKAD pada tahun 2022 meliputi 3 Program

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dimana dari masing masing program akan dijabarkan kembali kedalam kegiatan dan sub kegiatan yang spesifik yang lebih dapat menggambarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

3.2.1 Program Kegiatan dan Indikator Kinerja SKPD

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk mendukung fungsi dan tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai fungsi penunjang bidang keuangan daerah di Kota Cimahi. Uraian dari program ini mulai dari penyediaan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasana perkantoran baik berupa fasilitas peralatan dan perlengkapan kerja, maupun kebutuhan-kebutuhan mendasar pegawai BPKD baik berupa pemenuhan belanja gaji pegawai, kendaraan dinas, logistik atau juga koordinasi dan konsultasi

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diperuntukkan untuk pemenuhan dokumen maupun laporan yang rutin diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang sifatnya bulanan, triwulanan semesteran dan tahunan Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan anggaran SKPD, dokumen kinerja dan monev kinerja.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Kegiatan ini diperuntukkan untuk penyediaan laporan keuangan semesteran dan tahunan dan yang terpenting diperuntukkan untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN BPKAD termasuk didalamnya penganggaran untuk Jaminan Kesehatan, Jaminan kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya dokumen keuangan SKPD

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah

Kegiatan ini diperuntukkan untuk memfasilitasi pengurus barang dalam menyusun laporan administrasi barang milik daerah dan stok opname persediaan. Indikator hasil kegiatan ini adalah laporan stok opname dan laporan administrasi barang milik daerah pada SKPD.

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Kegiatan ini diperuntukkan untuk penyediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor seperti ATK, Cetak Penggandaan dan juga fasilitasi rapat-rapat internal/kunjungan tamu maupun fasilitasi koordinasi maupun konsultasi kedinasan dilingkup bidang tugas pokok dan fungsi

BPKAD. Indikator hasil kegiatan ini adalah terfasilitasinya paket kebutuhan administrasi umum perkantoran.

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Kegiatan ini diperuntukkan pemenuhan Barang Milik Daerah salah satunya kebutuhan tempat penyimpanan dokumen/ arsip dimana keberadaan ini menjadi bagian yang sangat penting mengingat arsip setiap tahunnya semakin bertambah sedangkan keberadaan ruangan tidak terjadi perubahan luas atau ukuran. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah barang milik daerah yang diadakan .

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Kegiatan ini merupakan kebutuhan penunjang dalam rangka penyediaan jasa baik penambahan kebutuhan tenaga harian lepas pelayanan umum maupun jasa- jasa pelayanan yang disediakan pihak ketiga yang dibutuhkan untuk kelancaran kerja contoh komunikasi, listrik dan pelayanan akses internet. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah terfasilitasinya paket kebutuhan paket jasa penunjang.

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Kegiatan ini diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dari kendaraan dinas jabatan maupun perorangan, baik dari perbaikan, pembayaran pajak dan pembayaran THL berkaitan dengan pemeliharaan kendaraan serta asuransi kendaraan. Adapun indikator nya adalah jumlah barang milik daerah yang dipelihara.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan dari rangkaian proses penyusunan Anggaran yang dimulai dari pengumpulan data data sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran juga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) yang dilanjutkan pada proses penyusunan RKA-SKPD, DPA SKPD Penyusunan Kebijakan Anggaran dan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen.

2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini merupakan fasilitasi pemenuhan dokumen dokumen pencairan anggaran yang diperlukan di semua SKPD seperti Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) termasuk fasilitasi koordinasi data-data berkaitan dana perimbangan dan pengelolaan Kas Daerah . Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen;

2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini merupakan rangkaian alur pelaksanaan/realisasi anggaran yang berkaitan dengan proses pencatatan transaksi keuangan oleh suatu entitas yang pada akhirnya akan bermuara pada penyajian Laporan Keuangan SKPD berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen;

2.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi selain menjalankan fungsi SKPD juga menjalankan fungsi sebagai PPKD. Kegiatan ini diperuntukkan memfasilitasi penyediaan anggaran untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman juga penganggaran belanja tidak terduga yang belum teranggarkan di SKPD. Adapun indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen;

2.5 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Dengan keluarnya Permendagri 70 Tahun 2019 yang dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik dalam satu sistem jaringan resmi Kementrian Dalam Negeri. Kegiatan ini menjembatani rangkaian alur dari implementasi SIPD yang akan diteruskan penerapannya di SKPD lewat serangkaian pelatihan aplikatif bagi pengelola keuangan yang ada di SKPD. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi (orang) yang dilakukan.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi kegiatan Perencanaan Kebutuhan BMD , Pengadaan BMD, Penggunaan BMD, Pemanfaatan BMD, Pengamanan dan Pemeliharaan BMD, Penilaian BMD, Pemindahtanganan BMD, Pemusnahan BMD, Penghapusan BMD, Penatausahaan BMD dan termasuk Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian BMD. Adapun indikator hasil kegiatan ini adalah jumlah dokumen.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD pada Perubahan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Murni Tahun 2022		Perubahan Tahun 2022	
	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		47.348.954.330		50.789.662.330
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		18.531.151.230		20.195.936.211
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		31.845.000		76.835.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja Murni 1 Dokumen Renja Perubahan 1 Dokumen 1 Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah 1 Dokumen Anggaran	23.115.000	1 Dokumen Renja Murni 1 Dokumen Renja Perubahan 1 Dokumen DPA 1 Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah 1 Dokumen DPPA	23.055.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen LKIP 1 Dokumen Survei kepuasan Masyarakat	8.730.000	1 Dokumen LKIP 1 Dokumen Survei kepuasan Masyarakat 1 Buku Teknis BTT 1 Laporan Bimtek	53.780.000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.660.732.730		17.464.642.730
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen Gaji 12 Dokumen Tambahan Penghasilan Pegawai 12 Dokumen Iuran Asuransi Kesehatan 12 Dokumen Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 12 Dokumen Iuran Jaminan Kematian 12 Dokumen Tunjangan Transportasi	17.653.290.730	14 Dokumen Gaji 12 Dokumen Tambahan Penghasilan Pegawai 12 Dokumen Iuran Asuransi Kesehatan 12 Dokumen Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 12 Dokumen Iuran Jaminan Kematian 12 Dokumen Tunjangan Transportasi	17.457.200.730
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen Laporan Keuangan Semester 11 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	4.440.000	1 Dokumen Laporan Keuangan Semester 11 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	4.440.000
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.002.000	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.002.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.714.500		1.714.500
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan Stock Opname	1.714.500	4 Laporan Stock Opname	1.714.500

Administrasi Umum perangkat Daerah			529.833.000		779.618.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- ATK 12 Bulan - Pemeliharaan Peralatan Kantor 12 Bulan -1 Set Partisi Kantor	159.184.000	ATK : 12 Bulan terpeliharanya Peralatan Kantor : 12 bulan Tersedianya Alat Kantor : 22 Unit	344.373.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 Dokumen Cetak	53.722.200	Terfasilitasinya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu : 12 bulan	59.329.200
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan Logistik Kantor 12 Bulan Makanan dan Minuman Rapat	27.069.800	Tersedianya Barang Cetakan : 7 Dokumen	29.908.800
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan Perjalanan Dinas	165.000.000	Terfasilitasinya Perjalanan Dinas : 12 bulan	184.050.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dus Arsip Dinamis	85.707.000	Terfasilitasinya gaji THL : 12 bulan Tersusunnya Arsip Dinamis : 269 Dus	85.707.000

	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Pemeliharaan Website BPKAD 1 Pengadaan Alat Zoom Meeting	39.150.000	Terlaksananya Sosialisasi Naskah Dinas Elektronik : 1 Kegiatan Terpeliharanya Website BPKAD dengan perbaikan beberapa fungsi dan tampilan Website : 12 bulan	77.250.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		70.000.000		70.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit Sewa Gudang	70.000.000	1 Unit Sewa Gudang	70.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.516.000		20.516.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan Pembayaran Telepon Dinas	5.400.000	12 Bulan Pembayaran Telepon Dinas	1.900.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan THL Kebersihan Kantor 12 Bulan Pemeliharaan Kebersihan Kantor	15.116.000	12 bulan THL Kebersihan Kantor 12 Bulan Pemeliharaan Kebersihan Kantor	18.616.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		216.510.000		214.710.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit Pemeliharaan Kendaraan Operasional	216.510.000	Terbayarnya Asuransi BMD : 15 Unit Terbayarnya gaji THL : 12 bulan terbayarnya pajak STNK Kendaraan Dinas : 21 unit Terpeliharanya barang milik daerah : 4 unit	214.710.000
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		27.805.665.800		30.881.988.800
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1.122.184.300		1.139.984.300
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1 Dokumen KUA 1 Dokumen PPAS	73.399.000	1 Dokumen KUA 1 Dokumen PPAS	73.399.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen KUA Perubahan 1 Dokumen PPAS Perubahan	66.213.000	1 Dokumen KUA Perubahan 1 Dokumen PPAS Perubahan	66.213.000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	1 x Asistensi RKA SKPD	159.360.200	1 x Asistensi RKA SKPD	171.210.200
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	1 x Asistensi RKA Perubahan SKPD	211.862.400	1 x Asistensi RKA Perubahan SKPD	180.327.400

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	1 x Asistensi DPA SKPD	21.711.700	1 x Asistensi DPA SKPD	16.733.700
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	1 x Asistensi DPA Perubahan SKPD	21.711.700	1 x Asistensi DPA Perubahan SKPD	14.511.700
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen Perda APBD 1 Dokumen Perwal APBD	127.828.600	1 Dokumen Perda APBD 1 Dokumen Perwal APBD	153.143.600
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen Perda Perubahan APBD2 Dokumen Perwal Perubahan APBD	126.892.200	2 Dokumen Perda Perubahan APBD2 Dokumen Perwal Perubahan APBD	136.240.200
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen Pedoman APBD 1 set SK Pengelola Keuangan 1 Dokumen Kebijakan Penganggaran	190.149.500	1 Dokumen Pedoman APBD 1 Dokumen Kebijakan Penganggaran	180.339.500
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 x Fasilitasi Rapat TAPD	15.786.400	12 x Fasilitasi Rapat TAPD	15.786.400

	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 x Pembinaan Penyusun Anggaran Perangkat Daerah	107.269.600	1 x Pembinaan Penyusun Anggaran Perangkat Daerah	132.079.600
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		232.345.200		237.935.200
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	48 Laporan Rekening Kasda	42.613.200	48 Laporan Rekening Kasda	42.613.200
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	224 Dokumen SPD	16.727.800	224 Dokumen SPD	16.727.800
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 Laporan Dana Perimbangan	21.331.000	5 Laporan Dana Perimbangan	26.921.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran	22.478.900	12 Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran	22.478.900
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	105 Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran	19.673.300	105 Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran	19.673.300

	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 x Dokumen Perkada Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah 1 x Sosialisasi Sisdur	76.447.600	1 x Dokumen Perkada Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah 1 x Sosialisasi Sisdur	76.447.600
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 x Pembinaan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan	33.073.400	1 x Pembinaan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan	33.073.400
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		624.051.200		649.051.200
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	4 x Pelaksanaan Rekonsiliasi	17.338.900	6 x Pelaksanaan Rekonsiliasi	27.338.900
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen Laporan Keuangan Semester 1 Dokumen Laporan Akhir Tahun	396.858.800	1 Dokumen Laporan Keuangan Semester 1 Dokumen Laporan Akhir Tahun	396.858.800
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Raperda Pertanggungjawaban 1 Perda Pertanggungjawaban	71.823.400	1 Raperda Pertanggungjawaban 1 Perda Pertanggungjawaban	71.823.400

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 X Fasilitasi Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah	18.221.000	2 X Fasilitasi Rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah	18.221.000
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen Kebijakan Akuntansi Daerah 1 Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Daerah	34.654.000	1 Dokumen Kebijakan Akuntansi Daerah 1 Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Daerah	34.654.000
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen Perkada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Sosialisasi SAPD	30.905.100	1 Dokumen Perkada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Sosialisasi SAPD	30.905.100
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1 x Pembinaan Analisis Laporan Keuangan Perangkat Daerah	26.634.000	2 x Pembinaan Analisis Laporan Keuangan Perangkat Daerah	36.634.000
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	1 Dokumen Kebijakan Akuntansi BLUD 1 Pembinaan Pengelola BLUD	14.373.600	1 Dokumen Kebijakan Akuntansi BLUD 2 Pembinaan Pengelola BLUD	19.373.600
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen Statistika Keuangan Pemerintah Daerah	13.242.400	1 Dokumen Statistika Keuangan Pemerintah Daerah	13.242.400
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		25.500.000.000		28.530.733.000

	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2 x Pembayaran Bunga Atas Pinjaman ke Bank Dunia	500.000.000	2 x Pembayaran Bunga Atas Pinjaman ke Bank Dunia	500.000.000
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 x Pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	1 x Pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga	28.030.733.000
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		327.085.100		324.285.100
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 x Pemeliharaan Aplikasi SIPD 1 x Sosialisasi SIPD Penatausahaan 1 x Sosialisasi SIPD Pertanggungjawaban	327.085.100	2 x Sosialisasi SIPD Penatausahaan 1 x Sosialisasi SIPD Pertanggungjawaban	324.285.100
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.012.137.300		1.279.637.300
	Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen Standar Harga Satuan	169.010.200	2 Dokumen Standar Harga Satuan	180.510.200

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen RKBMD 1 Dokumen RKBMD Perubahan	36.180.400	2 Dokumen RKBMD	32.610.400
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Perkada Kebijakan BMD	24.474.900	4 Peraturan Wali Kota	24.474.900
Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 X Pemeliharaan Sistem Elektronik Aset Kota	46.601.400	1 Kali Pemeliharaan 12 Bulan	145.637.400
Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen Inventarisasi BMD 1 set SK Penetapan Status Pengguna Barang	273.204.000	1 Dokumen 2 Set SK	221.675.000
Pengamanan Barang Milik Daerah	6 Dokumen Sertifikasi	149.207.800	6 Dokumen Sertifikasi	211.207.800
Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan Penelusuran Aset	148.700.000	5 dokumen	244.700.000
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen Pemanfaatan BMD 1 Dokumen Penghapusan BMD	11.722.100	1 kali kegiatan	11.722.100
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 dokumen	85.450.700	5 dokumen	93.950.700

	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	11.072.400	4 Dokumen BA	17.525.400
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 x Pembinaan Kustodian Perangkat Daerah	56.513.400	1 x Pembinaan Perangkat Daerah	95.623.400

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi 2017- 2022 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta Target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2022.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja semester 1.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Cimahi maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI



drg. CHANIFAH LISTYARINI, M.H.M
NIP. 196703201992032005